

PEDAGOGI KI HAJAR DEWANTARA UNTUK PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN NASIONAL

Rosmayasinta Makasau¹

Abstrak

Ki Hajar Dewantara (selanjutnya Dewantara) memulai pendidikan nasional dengan proses ideal dan tujuannya yang memerdekakan dan membebaskan manusia Indonesia, lahir dan batin. Konsep dan praktek pendidikan Dewantara ini masih sangat relevan untuk diperbincangkan dalam rangka kritik terhadap persoalan pendidikan dewasa ini. Visi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, Nadiem Makarim mempunyai kedekatan konsep-konsep pendidikan Dewantara. Ia menggagaskan “Merdeka Belajar” memberikan kesempatan bagi sekolah, guru dan muridnya bebas untuk berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Dengan demikian pendidikan menjadi proses yang menyenangkan dan memerdekakan.

Kata Kunci: *Pedagogi, pendidikan, kurikulum, merdeka belajar.*

PENGANTAR

Beberapa waktu terakhir, ketika Nadiem Makarim terpilih sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam kabinet Indonesia Maju, seperti biasanya, salah satu topik pembicaraan yang sering bergulir dalam banyak diskusi lima tahunan adalah soal kurikulum. Ada semacam jargon klasik yang diterima begitu saja, ‘beda Menteri Pendidikan, beda juga kurikulumnya; ganti Menteri Pendidikan, ganti kurikulum’. Sepertinya kurikulum masih menjadi persoalan dan banyak persoalan dalam hal konten dan implementasinya.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, Nadiem Makarim mengemukakan lima visinya di bidang pendidikan. Visi ini menjadi sangat penting karena akan menentukana arah, orientasi dan berbagai kebijakan di bidang pendidikan termasuk tentang kurikulum. Adapun lima visinya tersebut, sebagai berikut: 1. aspek pendidikan karakter. 2. aspek deregulasi dan debirokratisasi. 3. aspek peningkatan investasi dan inovasi. 4. aspek penciptaan lapangan kerja. 5. aspek pemberdayaan teknologi. (https://nasional.tempo.co/read/1269039/nadiem-makarim-paparkan-5-visi-di-bidang-pendidikan?page_num=1 s/d 3).

¹ Dosen Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke

Setelah menyimak visi Nadiem Makarim tersebut di atas, penulis tertarik untuk memberikan satu perspektif berupa penegasan kembali visi pendidikan Dewantara. Penulis membaca adanya korelasi konsep dan visi Dewantara dan Nadiem Makarim dalam hal pendidikan. Lebih lanjut, pemaparan ini lebih berupa pembacaan secara baru gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, secara khusus pedagoginya, dalam kerangka pendidikan kritis.

Menurut Bracher (2006), pedagogi seharusnya mencakup dua hal, yakni: pengetahuan (knowledge) dan pengajaran (teaching). Dimensi pengetahuan dirumuskan ke dalam bentuk kurikulum. Sementara pengajaran menyangkut interaksi dan relasi guru-murid. Relasi guru-murid ini merupakan relasi subyek-subyek. Tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri adalah pembentuk identitas subyek. Dengan kata lain, tujuan pendidikan semestinya untuk mengokohkan dan mengembangkan identitas, bukan malah menghancurkan identitas (damage identity). Proses pendidikan kritis semestinya bertolak dari tujuan pendidikan semacam itu, lalu bergerak kepada pertimbangan-pertimbangan akan isi pengetahuan apa yang seharusnya perlu diberikan dan bagaimana interaksi dan relasi guru-murid semestinya terjadi, guna mencapai tujuan itu. Dengan kata lain, pengetahuan (kurikulum) perlu berlandaskan konteks, kebutuhan dan pengalaman riil peserta didik sehari-hari.

Ketika membaca dan mendalami pemikiran dan praktek pendidikan Dewantara, penulis menemukan bahwa beliau rupanya mempunyai kesadaran kritis ini dan menerapkannya dalam sekolah yang ia dirikan, Taman Siswa. Dewantara sudah menjalankannya jauh sebelum ‘pendidikan kritis’ menjadi diskusi hangat pada tahun 1970-an (Murphy, 1996). Dewantara juga sudah berpikir dan mempraktekkan pendidikan sebagai proses yang memerdekakan dan membebaskan jauh sebelum terminologi itu dipopulerkan oleh tokoh lain seperti Paulo Freire (1970). Lebih dari itu, konsep Dewantara tentang pendidikan masih sangat relevan diperbincangkan dalam rangka kritik terhadap persoalan pendidikan dewasa ini. Dalam menyimak konsep-konsep pendidikan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, Nadiem Makarim, sangat dekat dengan visi dan misi pendidikan Dewantara. Beberapa alasan ini menjadi dasar bagi penulis untuk sedikit ‘bertolak ke tempat yang lebih dalam’ untuk menjaring pemikiran Dewantara tentang pedagogi.

KONTEKS PENDIDIKAN KOLONIAL MASA DEWANTARA

Pada akhir abad 19 sampai awal abad 20 pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Etis. Van Deventer memelopori dan mendorong gerakan itu, merasa Pemerintah Hindia Belanda perlu ‘balas budi’ kepada masyarakat pribumi Indonesia, karena Pemerintah Hindia Belanda telah banyak mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda semestinya menyelenggarakan pendidikan itu sebesar-besarnya untuk masyarakat pribumi Indonesia. Ada tiga program Politik Etis (trilogi), yakni: edukasi, irigasi dan transmigrasi. (Ricklefs 2007, Soeratman 1983).

Program edukasi menjadi prioritas. Sejak itu, munculah banyak lembaga pendidikan, yakni: Kweekshool (sekolah Guru), OSVIA, STOVIA (sekolah dokter Jawa), ELS (Europesse Lager School, setingkat SD), Volks School (sekolah desa), HOLLANDS CHINESE SCHOOL (HCS, setingkat SD), HOLLANDS INLANDSE SCHOOL (HIS, setingkat SD), MEER UITGEBREID LAGER ONDERWIJS (MULO, setingkat SMP), ALGEMENE MIDDELBARE SCHOOL (AMS, setingkat SMA), HOGERE BURGER SCHOOL (HBS). Dari sejumlah daftar sekolah tersebut, memang ada yang dikhususkan untuk pribumi, yakni HIS, MULO, dan HBS. HIS, MULO, dan HBS sangat sedikit, dan tidak mungkin untuk menampung semua anak-anak pribumi (Ricklefs 2007, Soeratman 1983).

Sekalipun demikian, pendidikan saat itu bersifat eksklusif, elitis dan rasis. Sekolah-sekolah tersebut hanya diperuntukkan bagi anak-anak golongan atas (ningrat, priyayi), anak pegawai pemerintah Belanda, atau anak pedagang kaya saja. Tidak ada tempat di sana untuk anak-anak buruh dan petani. Selain itu, sekolah-sekolah tersebut masih dibagi lagi berdasarkan kelas-kelas sosial (I, II, III), (Lih. Ricklefs 2007). Dewantara, sebagai seorang anak ningrat, semestinya mendapatkan pendidikan kelas I, tapi karena keterbatasan ekonomi ia disekolahkan di sekolah kelas III (Samho, 2013).

Pada sekolah-sekolah tersebut, diberlakukan kurikulum di Barat. Metode dan pendekatan pendidikan dan pengajaran juga mengikuti pola pendidikan Barat masa itu, yakni *regering, tucht, orde* (perintah, hukuman, dan ketertiban). Tujuan dari pendidikan yang diberikan kepada orang-orang pribumi saat itu adalah mempersiapkan mereka untuk menjadi pekerja profesional untuk kolonial Belanda. Sekalipun demikian, pemerintah penjajah tahu persis bahwa upaya serius mencerdaskan bangsa terjajah

merupakan upaya yang berbahaya sebab bisa mengancam stabilitas pemerintahannya kelak. Oleh karena itu, jalan terbaik yang menguntungkan mereka adalah “membatasi” sarana dan kesempatan pendidikan bagi generasi muda Indonesia (Dewantara 1977; Soeratman 1983; Samho 2013).

Pendidikan *a la* Barat bersifat *regering, tucht, orde* (perintah, hukuman dan ketertiban). Karakter pendidikan semacam ini dalam prakteknya merupakan suatu penjajahan atas kehidupan batin anak-anak. Akibatnya, anak-anak selalu hidup di bawah paksaan/tekanan dalam proses belajar. Menurut Dewantara, cara mendidik semacam itu tidak akan bisa membentuk seseorang hingga memiliki “kepribadian/identitas”. Pendidikan semacam ini, bagi Dewantara, hanyalah menjadi proses politik, cultural dan historis Belanda untuk melanggengkan hegemoninya, meneruskan marginalitas dan subordinasi pribumi Indonesia (Dewantara 1977).

Kesadaran inilah yang mendorong Dewantara untuk mendirikan Perguruan Taman Siswa. Dengan lembaga pendidikan tersebut, ia bercita-cita meningkatkan kesadaran generasi muda untuk menegaskan derajat dan martabat bangsanya. Ia yakin, jika generasi Indonesia pada masa itu cerdas maka mereka akan menjadi pembangun kesadaran bangsa untuk bangkit berjuang melawan segala bentuk penindasan dan merebut kemerdekaan (Ricklefs 2007; Soeratman 1983; Samho 2013; Dewantara 1977). Secara filosofis, cita-cita pendidikan Dewantara banyak dipengaruhi oleh pemikiran seorang filsuf Jawa bernama *Ki Ageng Suryomentaraman (KAS)*. KAS inilah yang menggagaskan tentang ‘*Kawruh Jiwa*’/‘*Science of psyche*’ atau ‘*Kawruh Beja*’/‘*Science of Happiness*’ dan juga pemikiran tentang ‘*Indonesianisme*’ (patriotism, nasionalisme). Dewantara mengenal pribadi dan pemikiran KAS ini, ketika bergabung bersamanya dalam “Paguyuban Selasa Kliwon”. (Bonneff 1993). Karena itu, Dewantara menggagaskan cita-cita pendidikan sebagai daya upaya untuk membahagiakan diri, membahagiakan bangsa dan membahagiakan manusia. Kebahagiaan itu hanya akan diperoleh melalui pembebasan dan kemerdekaan seseorang atau suatu masyarakat secara lahir dan batin. Bagi Dewantara, pendidikan merupakan jalan menuju kebebasan dan kemerdekaan manusia seutuhnya.

KONSEP KI HAJAR DEWANTARA TENTANG PENDIDIKAN

1. Visi: Pendidikan Holistik Yang Memerdekakan.

Bagi Dewantara, pendidikan merupakan kunci bagi seseorang dan suatu bangsa untuk menggapai kemerdekaan secara lahir dan batin. Pendidikan harus menjadi bagian sentral dan dasar gerakan perjuangan untuk menggapai 'Imajined Community' (Indonesia Merdeka/Indonesia Raya). Pendidikan nasional, sejatinya, diperuntukkan bagi seluruh generasi muda Indonesia tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial serta didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi (Dewantara 1977; Soeratman 1984).

Pendidikan mesti berhubungan dengan keseluruhan dimensi manusia lahir dan batin. Pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Bagi Dewantara, pendidikan semestinya berorientasi pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan sepenuhnya, yakni menyangkut kualitas kognitif, konatif, afektif, psikomotor, sosial, moral dan spiritual). Dengan demikian, pendidikan itu membentuk manusia yang berbudi pekerti, berpikiran (pintar, cerdas) dan bertubuh sehat. Pendidikan menjadi wadah untuk membangun otonomi intelektual, otonomi eksistensial, dan otonomi sosial (Samho 2013; Soeratman 1983).

Jadi, melalui pendidikan, Dewantara hendak membangun citra manusia Indonesia. Pertama, manusia Indonesia yang berbudi pekerti, yakni memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Istilah budi pekerti menyangkut perkataan, sikap dan tindakan yang selaras dengan kebenaran ajaran agama, adat-istiadat, hukum positif, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Kedua, manusia Indonesia yang cerdas (kognitif), yakni terbebas dari kebodohan dan pembodohan dalam berbagai jenis dan bentuknya. Ketiga, manusia Indonesia yang sehat secara jasmani dan memiliki pengetahuan serta kemampuan mengendalikan hasrat hasrat tubuh dan kebertubuhannya (Dewantara, 1977).

Pendidikan seutuhnya menurut Dewantara adalah pendidikan yang berakar pada konteks pengalaman, kebutuhan dan budaya sehari-hari siswa dan masyarakatnya. Pengetahuan yang dibagikan

kepada para siswa adalah pengetahuan tentang realitas dirinya dan masyarakatnya, serta apa yang mereka butuhkan dari refleksi atas realitas mereka. Inilah yang menjadi dasar penolakan Dewantara terhadap kurikulum yang diberikan di sekolah-sekolah kolonial dan penerapan metode pendidikan dan pengajarannya (Dewantara 1977; Soeratman 1983).

Pendidikan yang holistik tersebut juga mesti memerdekakan. Dewantara menyebut gagasan ‘pendidikan yang memerdekakan’nya terinspirasi dari praktek pakar pendidikan Maria Montesori di sebuah Taman Kanak-Kanak di Belanda, yang ia temui ketika dibuang di sana. Menurut Dewantara, ‘pendidikan yang memerdekakan’ itu bukan hanya tentang tujuannya yang memerdekakan individu pelajar dan masyarakatnya, tetapi juga mencakup prosesnya yang juga memerdekakan. Pendidikan merupakan upaya konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Maka pendidikan harus bersentuhan dengan upaya-upaya konkret berupa pengajaran dan pendidikan. Menurut Dewantara, pengajaran adalah upaya memerdekakan aspek badaniah manusia (hidup lahirnya). Aktivitas pengajaran itu berupa tindakan informatif (transfer of knowledge) dan sekaligus formatif (membangun kesadaran akan identitas dan membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensi-potensi dalam dirinya). Karena itu, Dewantara mengembangkan proses pendidikan dan pengajaran dalam suasana yang menyenangkan dan membahagiakan peserta didik. Dewantara memahami tentang ‘mendidik’ itu sama dengan ‘mengasuh’ (among).

Bagi penulis, ini merupakan metafora yang dipakai untuk menggambarkan suasana pembelajaran yang nyaman, akrab (feel at home, suasana kekeluargaan) dan menyenangkan. Interaksi guru-murid itu seperti orang tua-anak yang sudah saling mengenal secara mendalam dan dalam suasana penuh cinta, perhatian dan saling menghargai. Selain itu, materi pembelajaran selalu bertolak dari konteks lokal, kebudayaan, keseharian dan lingkungan peserta didik. Atau sebaliknya, materi yang bersifat umum kemudian dikontekstualisasikan (Soeratman 193; Samho 2013).

Dengan pendidikan semacam ini, maka terbentuklah manusia Indonesia yang *tetep, antep dan mantep; ngandel, kandel, kendel dan bandel*; dan *neng, ning, nung dan nang*. *Tetep, Antep, Mantep* artinya bahwa pendidikan itu harus membentuk ketetapan pikiran dan batin, menjamin keyakinan diri dan membentuk kemantapan dalam prinsip hidup. *Ngandel, Kandel, Bandel* artinya “berpendirian tegak”, berani, percaya diri dan “tahan uji”. *Neng, Ning, Nung, Nang* (meneng, wening, hanung, menang) artinya bahwa pendidikan pada tataran terdalam bercorak religius. Pendidikan itu menciptakan kesenangan perasaan/ketentraman lahir batin (*neng*), kejernihan pikiran (*ning*), kemauan yang kuat kokoh (*nung*) dan akhirnya memenangkan perjuangan/kepercayaan (*nang*) (Soeratman 1983; Dewantara 1977).

2. Asas-Asas Pendidikan.

Dewantara mengajukan lima asas pendidikan yang dikenal dengan sebutan *pancadharma* (kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan).

Pertama: Asas Kodrat Alam. Pada hakikatnya manusia adalah bagian dari alam semesta. Dewantara menegaskan bahwa secara kodrati, akal-pikiran manusia itu dapat berkembang (evolustif). Manusia seutuhnya dapat berkembang ke arah yang lebih baik melalui pendidikan. *Kedua: Asas Kemerdekaan.* Pendidikan merupakan proses yang mengarahkan manusia kepada pembebasan dan pemerdekaan individu dan masyarakatnya. Kemerdekaan dan pembebasan itu menjadi prasyarat terwujudnya kebahagiaan. Proses pendidikan perlu dikembangkan dengan metode dan pendekatan yang memerdekakan, yang memberi ruang untuk aktualisasi dan pengembangan potensi-potensi anak didik.

Ketiga: Asas Kebudayaan. Manusia adalah makhluk berbudaya. Pendidikan perlu dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai budaya peserta didik. Selain itu, konstruksi pengetahuan yang diajarkan semestinya bertolak dari kebutuhan dan konteks kehidupan dan kebudayaan peserta didik dan masyarakatnya. *Keempat: Asas Kebangsaan.* Pendidikan mesti dilandasi oleh ideologi kebangsaan, spirit patriotisme dan nasionalisme. Dengan demikian, pendidikan

semakin meningkatkan cinta tanah air dan bangsa. Ini sebenarnya semangat yang mendasari seluruh kehidupan dan perjuangan, aktivitas politik, jurnalistik dan pendidikan Dewantara.

Kelima: Asas Kemanusiaan. Dewantara menegaskan bahwa apa pun yang dikembangkan oleh manusia dalam bidang apa pun juga harus selalu sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Pendidikan semestinya semakin memanusiakan manusia atau humanisasi manusia. Tidaklah mengherankan apabila Dewantara mungkin tepat dipandang sebagai seorang pendidik yang humanis (Dewantara 1977; Soeratman 1983; Samho 2013).

3. Semboyan Pendidikan.

Hal yang paling dikenal dari Dewantara mungkin semboyannya yang menjadi prinsip dasar bagi seorang guru. *Ing Ngarsa Sung Tuladha* artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberi teladan. Ia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Guru sebagai inspirator, motor, director (penentu/penunjuk arah) dan fasilitator dituntut memiliki integritas kepribadian. *Ing Madya Mangun Karsa* artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Guru adalah partner siswa dalam belajar. *Tut Wuri Handayani* artinya seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang anak-anak didiknya. Guru dituntut mempunyai kemampuan untuk memberikan motivasi belajar bagi muridmuridnya (Dewantara 1977; Soeratman 1983; Samho 2013).

4. Metode.

Berkaitan dengan semboyannya di atas, Dewantara memahami pekerjaan seorang pendidik itu bersifat mengasuh (Momong, Among, Ngemong). Sebagai pengasuh, seorang guru dituntut mempunyai integritas, berbudi pekerti, matang dalam penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai kultural yang khas Indonesia. Guru juga mesti memiliki kapasitas pengetahuan dan kapabilitas pengajaran. Dengan itu guru akan mampu mengasuh anak-anak didik, membantunya mengembangkan potensi-potensi diri

(kognisi, afeksi, psikomotorik, konatif, kehidupan sosial dan spiritual), serta mengembangkan dan mengokohkan identitas murid. Dalam praktek ‘mengasuh’ itu, guru kembali mesti meletakkan dasarnya pada asas-asas: alamiah, kebudayaan, kemanusiaan, kemerdekaan dan kebangsaan.

Dalam mengasuh, guru dapat melakukan banyak hal. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya guru melakukan beberapa hal prioritas, yakni: Memberi contoh (*voorbeelt*), pembiasaan (*pakulinan, gewoontevorming*), pengajaran (*leering, wulang-wuruk*), laku (*zelfbeheersching*), dan pengalaman lahir batin (*nglakoni, ngrasa/Beleving*) (bdk. Ki Hajar Dewantara 1977: 12). Keseluruhan metode dan pendekatan pendidikan ini dilaksanakan dalam semangat kekeluargaan dan kemerdekaan (Dewantara 1977; Soeratman 1983; Samho 2013).

RELEVANSI PEMIKIRAN DEWANTARA UNTUK PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN NASIONAL

Kurikulum pendidikan hingga saat ini belum final. Pemikiran Dewantara tentang pendidikan perlu kita cermati dalam memberikan catatan kritis terhadap Kurikulum 2013 yang masih dipakai sebagai acuan hingga saat ini. Selain itu, sangat menarik bahwa beberapa pemikiran dan kebijakan pendidikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim saat ini sangat dekat dengan visi pendidikan Dewantara.

1. Landasan Filosofis Dan Landasan Konseptual.

Secara teoritis, landasan filosofis dan konseptual Kurikulum 2013 sangat mencerminkan visi filosofis pendidikan dan pedagogi Dewantara. Secara filosofis, Kurikulum 2013 berlandaskan Pancasila dan berbasiskan nilai-nilai luhur, nilai nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Sementara itu, pada tataran konseptual, Kurikulum 2013 berlandaskan pada pemikiran, sebagai berikut: Relevansi pendidikan (*link and match*), Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, Pembelajaran kontekstual (*Contextual teaching and learning*), Pembelajaran aktif (*Student active learning*), Penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh.

Jadi, secara filosofis dan konseptual Kurikulum 2013 yang masih dipakai hingga saat ini sejalan dengan pemikiran Dewantara.

Dalam beberapa kritiknya terhadap kurikulum saat ini, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentu memakai landasan yang sama. Salah satu contohnya, ketika berbicara tentang pendidikan karakter, Nadiem menjadikan Pancasila sebagai kerangka berpikir dan sumber nilai dalam pendidikan.

2. Konstruksi Kurikulum.

Dalam desain pengembangan kurikulum 2013 (bdk. Mulyasa 2013: 82-86), titik tolak pengembangan struktur kurikulum adalah identifikasi kompetensi, yang dimulai dengan penjabaran bidang studi, penjabaran mata pelajaran, analisis taksonomi, masukan dari profesi, membangun teori, lalu terakhirnya meminta masukan peserta didik dan masyarakat. Dari konstruksi semacam ini, menurut penulis, ada inkoherensi antara kerangka filosofis Kurikulum 2013 dengan praktek pengembangannya. Berdasarkan perspektif Dewantara dan juga rumusan filosofis Kurikulum 2013, semestinya kebutuhan peserta didik dan masyarakat menjadi dasar dari pengembangan kurikulum dan juga dasar dari identifikasi kompetensi untuk setiap mata pelajaran.

Penulis menangkap ada beberapa strategi penting Dewantara dalam mengkonstruksikan kurikulumnya.

Pertama: pembentukan kurikulum bertolak dari analisis atas konteks dan kebutuhan siswa dan masyarakatnya. Dalam hal ini, Dewantara sangat menekankan dimensi dan karakter lokalitas dari kurikulum pendidikan. Sejalan dengan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim berpendapat bahwa pendidikan di Indonesia tidak mesti harus seragam di seluruh wilayah. Menurutnya, kurikulum pendidikan di daerah Papua tidak dapat diselaraskan dengan apa yang ada di Jakarta. Hal semacam ini penting dalam menciptakan sebuah sistem pendidikan yang berkualitas. (<https://news.detik.com/berita/d-4863665/mendikbud-nadiem-tekankan-pentingnya-pendidikan-bersifat-inklusif>).

Kedua: dalam pengembangan kurikulumnya, Dewantara sangat memperhatikan psikologi perkembangan anak dan psikologi pendidikan. Rupanya Dewantara sangat memahami ilmu psikologi ini. Kurikulum disusunnya berdasarkan jenjang perkembangan anak dan

kebutuhannya. Salah satu kritik terhadap Kurikulum 2013 adalah bahwa kontennya yang sangat banyak dan membebankan guru, terlebih siswanya. "Jadi sekarang itu sifatnya dipaksa pada level umur segini, anak harus bisa ini, kalau udah ketinggalan ya akan ketinggalan terus," ujar Nadiem (<https://news.detik.com/berita/d-4863665/mendikbud-nadiem-tekankan-pentingnya-pendidikan-bersifat-inklusif>). Hal ini tentu secara psikologis kontraproduktif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didik.

Ketiga: menentukan tujuan pendidikan. Penentuan tujuan-tujuan pendidikan/pembelajaran ini terkait erat dengan konteks lokalitas dan psikologi perkembangan peserta didik. "Menurutnya, akibat penyeragaman sistem pendidikan di Indonesia membuat banyak anak dipaksa bisa mencapai sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi levelnya. Dalam pandangan Nadiem, hal tersebut tidak relevan dalam perkembangan anak didik tersebut." (<https://news.detik.com/berita/d-4863665/mendikbud-nadiem-tekankan-pentingnya-pendidikan-bersifat-inklusif>).

Keempat: merumuskan isi atau konten kurikulum untuk menjawab kebutuhan peserta didik dan masyarakat serta mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini, salah satunya ditegaskan bahwa arah pendidikan nasional juga untuk menjawab kebutuhan industri dan pengembangan ekonomi (<https://nasional.tempo.co/read/1299247/nadiem-makarim-luncurkan-4-kebijakan-kampus-merdeka-apa-saja>).

Kelima: mendesain praksis pedagogis yang akan dipakai untuk merealisasikan suatu proses pendidikan dan pengajaran yang dicita-citakan. Dalam praktek pedagogis Dewantara, penulis membaca adanya koherensi antara konteks/kebutuhan, tujuan pendidikan, content/isi/materi dan praksis pedagogis (bdk. Dewantara 1977).

PENDIDIKAN KHARAKTER ATAU BUDI PEKERTI

Menurut Dewantara pendidikan mesti menjadikan manusia Indonesia berbudi pekerti, yakni memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Istilah budi pekerti menyangkut perkataan, sikap dan tindakan yang selaras dengan kebenaran ajaran agama, adat-istiadat, hukum positif, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan

universal. Senada dengan Dewantara, Nadiem mengatakan bahwa esensi pendidikan karakter adalah moralitas universal, atau dalam bahasa agamanya disebut akhlak. Nadiem juga menekankan bahwa Pancasila menjadi salah satu framework untuk pendidikan karakter. "Pointnya itu sangat jelas apa esensi, nilai, dan prinsip hidup berdasarkan lima sila tersebut. Kita mengerti apa yang kita inginkan dari pendidikan karakter, tapi metode penyampaiannya tidak *link and match*,"ujarnya.(<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/30/pe-njelasan-nadiem-makarim-tentang-pendidikan-karakter>).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengamini gagasan Dewantara ini. Ia menjadikan pendidikan karakter sebagai program prioritasnya. "Pertama, yang terpenting itu pendidikan karakter. Sekarang yang sedang terjadi dengan besarnya peran teknologi, kalau pemuda tidak punya karakter, integritas, analisa informasi dengan kuat, maka akan tergerus dengan berbagai macam informasi yang tidak benar," terang dia (<https://republika.co.id/berita/q0jqev428/nadiem-sebut-pendidikan-karakter-jadi-prioritas-utama>).

Dalam hal ini, pendidikan budi pekerti itu sebagai pendidikan nilai dalam keseluruhan nilai-nilai agama, adat istiadat, kebudayaan, kebiasaan, norma, hukum positif, aturan-aturan, disiplin, serta petunjuk yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai inilah yang membentuk dan menjadi dasar karakter manusia Indonesia. Sejatinya, pendidikan budi pekerti itu diajarkan, dilaksanakan dan diimplementasikan di dalam keseluruhan suasana, budaya sekolah dan konteks sekolah itu sendiri. Setiap mata pelajaranpun semestinya menjadi bagian dari pelajaran budi pekerti juga.

Lebih dari itu, Dewantara meyakini bahwa pendidikan budi pekerti itu melekat pada pelajaran seni (sastra, musik, tari, rupa) dan olah tubuh. Sehingga tidak heran, dalam kurikulum Dewantara, dari Taman Kanak-Kanak sampai Taman Dewasa, Pendidikan Seni dan Olah Raga menjadi mata pelajaran wajib. Ia berpendapat bahwa seni merupakan ekspresi material dari jiwa, yang spiritual. Seni dapat menghaluskan budi dan memantapkan nurani. Ritme musik misalnya dapat memengaruhi gerakan dan ritme tubuh. Jadi, jauh lebih efektif pendidikan budi pekerti dengan mengajarkan seni tradisi kepada para

murid. Karena memang, penanaman falsafah dan nilai-nilai budi pekerti dalam masyarakat dan budaya kita dikemas di dalam berbagai ekspresi seni itu (bdk. Dewantara 1977). Pendidikan seni yang dimaksudkan Dewantara disini adalah siswa-siswi berekspresi seni dalam praktek bermain gamelan, menari ronggeng, bermain okulele, dan lainnya. Bukan untuk pertama-tama bahwa mereka harus mengetahui dan memahami teori-teori seninya. Bagi Dewantara, ekspresi seni tradisional Indonesia erat kaitannya dengan pendidikan budi pekerti. Sederhananya, untuk menjadi seorang berbudi pekerti Jawa, misalnya, bermainlah gamelan, nyanyilah tembang-tembang tradisi, mem-batiklah, dan seterusnya (bdk. Dewantara 1977).

Gagasan Dewantara di atas menjadi acuan dalam konsep Merdeka Belajar yang digagas oleh Mendikbud, Nadiem Makarim. Pendidikan Karakter tidak bisa hanya dimasukkan ke dalam kurikulum ataupun baca buku saja, sebagaimana dalam Kurikulum 2013. "Kita tidak mungkin belajar nilai-nilai, kalau tidak dilakukan melalui kegiatan pendidikan karakter tersebut. Selain itu pendidikan karakter harus melibatkan keluarga dan masyarakat. Jadi salah satu yang akan saya canangkan adalah bagaimana pendidikan karakter langsung ada dalam masyarakat dan konten-konten kekinian, agar masyarakat tahu apa itu moralitas, masyarakat sipil, akhlak melalui contoh nyata bukan filosofi," (<https://republika.co.id/berita/q0jqev428/nadiem-sebut-pendidikan-karakter-jadi-prioritas-utama>).

Kemerdekaan belajar artinya kemerdekaan di setiap jenjang unit pendidikan. Nadiem sepakat dengan Dewantara tentang hal ini. Ia mengungkapkan bahwa "perbaikan arah kebijakan pendidikan begitu penting, agar proses pembelajaran tidak hanya fokus pada pencapaian nilai akademik, tapi juga bisa menjadi pengalaman menyenangkan bagi para siswa dan guru. Di samping itu, guru juga diajak untuk terlibat lebih banyak sebagai fasilitator dalam pembelajaran" (<https://tekno.tempo.co/read/1307558/mendikbud-nadiem-makarim-budaya-pendidikan-kita-harus-berubah/full&view=ok>).

Konsep besar tentang Merdeka Belajar dijabarkannya dalam empat kebijakan, sebagai berikut:

1. Mengganti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. Dalam kebijakan sebelumnya, sebanyak 20%-25% butir soal USBN disiapkan oleh Kementerian, sedangkan 75%80% butir soal disiapkan oleh para guru melalui forum Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dengan demikian, sekolah otonom untuk membuat sendiri format dan model asesmen yang lebih komprehensif dan sesuai konteks sekolahnya.
2. Menghapus format Ujian Nasional yang sebelumnya, lalu menggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Selama ini, kualitas akademik yang diukur melalui Ujian Nasional. Hal ini banyak menimbulkan protes karena kesenjangan infrastruktur, sarana prasarana, tenaga guru profesional, serta kondisi geografis yang berbedabeda dari setiap daerah di Indonesia. Kemendikbud berharap hasil asesmen digunakan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.
3. Menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang komponennya terlalu banyak dan kaku. Guru diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP sendiri. Sementara komponen inti dalam RPP disederhanakan hanya menjadi satu halaman saja (sebelumnya hingga 20 halaman).
4. Memberikan fleksibilitas dalam sistem zonasi dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (<https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/12/12591771/gebrakan-merdeka-belajar-berikut-4-penjelasan-mendikbud-nadiem>).

Selain soal asesmen, Nadiem juga menyadari bahwa apapun design kurikulum, ujung-ujungnya tergantung pada kualitas profesional dan integritas guru. Contoh, di Finlandia, guru mempunyai otonomi dan otoritas untuk menentukan metode pembelajaran dan praksis pedagoginya. Mengingat hal itu, pemerintah sungguh memperhatikan kualitas pendidikan keguruan dan berbagai pendidikan dan pelatihan. Dalam perspektif Dewantara, guru pertama-tama perlu mempunyai kesadaran pendidikan kritis dan pedagogi resistensi, profesionalitas dan integritas. Lebih dari itu, pada poin kebijakan Merdeka Belajar, Nadiem memberikan perhatian pada peran profesional seorang guru. Ia mengaggaskan bahwa guru sebagai

penggerak pendidikan di sekolah. Nadiem menambahkan "Keutamaan itu juga berlaku untuk murid dan pembelajaran murid. Dan karena itu dia akan mengambil tindakan-tindakan tanpa disuruh tanpa diperintahkan untuk melakukan yang terbaik bagi muridnya." Nadiem merombak kebijakan administrasi guru yang sangat menyita waktu dan tenaga, seperti RPP. Nadiem ingin agar para guru diberikan ruang lebih untuk bergerak dan berinovasi dalam proses belajar mengajar.

Untuk mewujudkan cita-citanya tentang guru penggerak tersebut, Nadiem merencanakan program peningkatan kompetensi guru melalui banyak pelatihan secara berkala. Ia menyatakan "Budaya pendidikan kita harus berubah, bagaimana cara guru mengajar, cara meningkatkan motivasi siswa belajar, itu sangat penting untuk diperhatikan," (<https://tekno.tempo.co/read/1307558/mendikbud-nadiem-makarim-budaya-pendidikan-kita-harus-berubah/full&view=ok>).

PENUTUP

Konteks pendidikan pada masa Dewantara yang mahal, elitis, diskriminatif, perbedaan kesempatan belajar, orientasi kognitif, masih juga terjadi hingga saat ini. Gagasan-gagasannya tentang pendidikan masih relevan dalam konteks Indonesia yang terus berubah. Sampai kapanpun, pendidikan nasional mesti berasaskan Pancasila dan berbasiskan nilai-nilai luhur, nilai-nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Pendidikan budi pekerti tetap menjadi tujuan utama, selain bahwa pelajar memperoleh kompetensi sesuai bidang yang dipilinya. Dengan demikian, pendidikan menghasilkan manusia Indonesia yang kompeten, kompetitif dan sekaligus juga berkarakter.

Penulis menemukan ada korelasi visi dan pemikiran Dewantara dengan beberapa gagasan dan kebijakan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. Bahkan, menurut penulis Nadiem merevitalisasi pemikiran Dewantara dalam konteks Indonesia saat ini di tengah perkembangan teknologi. Sebagian hal baru dalam pemikiran Nadiem Makarim adalah pengembanga pendidikan berbasis teknologi. Pada titik ini, Nadiem sedang ada dalam upaya menjadikan manusia Indonesia yang unggul, kompeten, maju, tetapi sekaligus berkarakter, sebagaimana dicitacitakan juga oleh Dewantara.

Daftar Pustaka

- Bracher, Mark. 2006. *Radical Pedagogy*. New York: Palgrave Mcmillan.
- Dewantara, Ki Hajar. 1977. *Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Mulyasa, H. S. 2013. *Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: P.T. Remaja Rosdekarya.
- Ricklefs, 2007. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (cetakan ke-3)*. Jakarta: SERAMBI.
- Soeratman, Darsiti. 1983. *Ki Hajar Dewantara*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Bunga, Halida. 2019. Pemaparan Lima Visi Di bidang Pendidikan. <https://nasional.tempo.co> (akses 12 April 2020).
- Ernes, Yogi. 2020. Pentingnya Pendidikan bersifat Inklusif. <https://news.detik.com> (akses 15 April 2020).
- Dyah Utami, Larasati. 2019. Kebijakan Mendikbud Baru. <https://www.tribunnews.com> (akses 08 April 2020).
- Adit, Albertus. 2019. Merdeka Belajar. <http://edukasi.kompas.com> (akses 07 April 2020).
- Puspita, Ratna. 2019. Pendidikan Karakter. <https://republika.co.id> (akses 07 April 2020)
- Utami Putri, Budiarti. 2020. Empat Kebijakan Kampus Merdeka. <https://nasional.tempo.co> (akses 08 April 2020).

TENTANG PENULIS

Dedimus Berangka, M.Pd.

Lahir di Jongkong Manday, 21 Desember 1986. Mengenyam pendidikan sarjana (S1) pada prodi Pendidikan Agama Katolik, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan strata dua di Universitas Cendrawasih Jayapura pada tahun 2016.

Steven Ronald Ahlaro, M.Pd.

Lahir Kuay Melu-Maluku 6 Mei 1984. Mulai tahun 2009 sampai saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke. Tahun 2014 melanjutkan studi ke jenjang magister di Universitas Negeri Surabaya dan selesai pada tahun 2016.

Yohanes Hendro Pranyoto, M.Pd.

Lahir di Gunungkidul, Yogyakarta tanggal 17 Juni 1990. Lulus pendidikan sarjana (S1) tahun 2012 pada prodi Pendidikan Agama Katolik, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Oktober 2013 hijrah ke Merauke sebagai tenaga pendidik di STK St. Yakobus Merauke. Menyelesaikan pendidikan Pascasarjana pada program studi Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Cenderawasih, Jayapura, tahun 2016.

Yan Yusuf Subu, M. Hum.

Lahir di Waidahi-Flores, 27 Desember 1981. Lulus pendidikan sarjana (S1) tahun 2007 di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere-Flores. Mulai bekerja sebagai tenaga pendidik di STK St. Yakobus Merauke pada bulan Juli 2009. Menyelesaikan pendidikan Pascasarjana pada program studi Magister Ilmu Teologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2018.

Resmin Manik, M.Pd.

Adalah biarawati (KYM). Lahir di Sipolha, 02 Januari 1974. Pada tahun 2002 menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Widya Manda Madiun jurusan Bimbingan dan Konseling. Agustus 2014 - Agustus 2016

memperoleh kesempatan tugas belajar di Universitas Negeri Malang pada program studi Bimbingan dan Konseling.

Dr. Donatus Wea S. Turu, Lic. Iur.

Lahir di Bajawa-Flores, 17 Juli 1970. Sebagai imam projo Keuskupan Agung Merauke, ditahbiskan pada 28 Oktober 2001. Pada tahun 2008, menyelesaikan studi licensiat Hukum Gereja di Universitas Pontifical Urbaniana Roma. Pada bulan Februari 2020 menyelesaikan program Doktor di Universitas Negeri Semarang.

Rosmayasinta Makasau, M.Hum

Lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 Oktober 1983. Menempuh pendidikan sarjana (S1) pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Halu Oleo dan lulus tahun 2007. Sejak tahun 2007 mulai bekerja di STK St. Yakobus Merauke sebagai dosen tetap. Tahun 2013 mendapat tugas belajar di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada Program Studi Magister Kajian Bahasa Inggris dan lulus tahun 2015.